

IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*: DAMPAKNYA PADA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Syamsul¹, Siti Zuhroh²

Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu¹²

Email: syamsulsyahrir@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak implementasi *e-government* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengambilan data primer menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan melakukan penelusuran pada website resmi pemerintah daerah di Indonesia. Pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penetapan sampel tersebut, diantaranya pemerintah daerah yang mempunyai website resmi dan dapat diakses pada waktu penelitian dari bulan Maret-Agustus 2020, dan memiliki data transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menginformasikan bahwa implementasi *e-government* berdampak secara positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menguatkan riset sebelumnya dan sejalan dengan tujuan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Informasi penelitian ini bermanfaat, untuk dijadikan referensi tambahan bagi para pengambil kebijakan terkait dengan implemmentasi *e-government* dan peningkatan transparansi keuangan pemerintah pada masa mendatang.

Kata Kunci: *e-government*; *transparansi*; *keuangan daerah*

Abstract

This study aims to explain the impact of e-government implementation on the transparency of local financial management. This type of research is a quantitative study using primary data. The primary data collection technique uses content analysis techniques, namely by conducting a search on the official website of local government in Indonesia. The sample selection using purposive sampling by determining certain criteria. The criteria used in determining the sample, including local governments that have an official website and can be accessed at the time of the study from March-August 2020, and have data on transparency of regional financial management for the 2019 fiscal year. Furthermore, the data were analyzed using simple linear regression analysis techniques. The results of the study inform that the implementation of e-government has a positive impact on the transparency of regional financial management. This finding is corroborating from previous research and is in line with the objectives of the issuance of Presidential Instruction No. 3 of 2003. This research information is useful, to be used as an additional reference for policy makers related to e-government implementation and increasing transparency of government finances in the future.

Keywords: *e-government*; *transparency*; *local financial*

1. PENDAHULUAN

Transparansi adalah salah satu dari prinsip good governance. Prinsip transparansi menyiratkan administrasi publik yang terbuka dan transparan. Saat ini, telah dilakukan berbagai upaya untuk

mempromosikan transparansi pada setiap level pemerintahan (Cucciniello, Porumbescu, & Grimmelikhuijsen, 2017). Mengingat, transparansi dipercaya berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah dan mendorong penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait ke-

bijakan dan kinerja pemerintah (Wei Wu, Liang Ma, 2017). Di sisi lain, transparansi juga dipandang sebagai media bagi pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan. Mulai dari, mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kemudian meningkatkan kinerja keuangan, memperluas keterbukaan publik, memitigasi perilaku tidak etis, mendorong legitimasi, meningkatkan komitmen, melindungi kepentingan publik, pengurangan korupsi, dan mempromosikan partisipasi publik (Bertot, Jaeger, and Grimes 2011; Cucciniello, Porumbescu, and Grimmelikhuijsen 2017; Piotrowski 2017). Dengan demikian, beberapa tahun belakangan ini, pemerintah di banyak Negara telah berupaya untuk mendorong keterbukaan dan transparansi mereka (Marek, 2016).

E-government dianggap mampu untuk memperbaiki transparansi pemerintah dan dapat mereduksi korupsi (Lupu & Georgiana, 2015). Senada dengan itu, Ardielli (2016) juga mengemukakan bahwa penerapan *e-government* memberikan peluang signifikan untuk mengubah administrasi publik menuju transparansi, keterbukaan dan ketersediaan informasi yang lebih banyak. Lebih lanjut, López, Antelo, Vázquez, Connolly, & Bannister (2018) menyatakan bahwa di dalam literature *e-government* tidak ada perdebatan terkait dengan kebermanfaatan *e-government* dalam mendorong peningkatan transparansi pemerintah, bahkan dikatakan bahwa *e-government* yang memfasilitasi terwujudnya transparansi pemerintah yang lebih luas. Intinya, *e-government* diyakini mampu meningkatkan transparansi pemerintah.

Di Indonesia, sejak ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, mengharuskan setiap organisasi pemerintah, dari lingkup pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah untuk merancang dan mengembangkan, serta mengimplementasikan konsep *e-government*, sebagai wadah penyaluran informasi kepada publik. Intinya, penerapan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan transparansi (keterbukaan) informasi seluas-luas terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Sayangnya, sebaik pengetahuan dan pencarian peneliti, belum adanya penelitian yang berusaha menjelaskan apakah implementasi *e-government* mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia? Padahal jawaban atas pertanyaan itu penting, bagi para pengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan *e-*

government dan promosi transparansi pengelolaan keuangan daerah pada periode mendatang.

Melangkah dari fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dampak dari implementasi *e-government* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Disisi lain, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan rujukan dalam rangka mengevaluasi implementasi *e-government* dan pedoman penilaian tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep *E-government*

Secara umum dari berbagai definisi tentang *e-government* menurut Sayimer (2015) adalah bahwa *e-government* pada dasarnya menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan layanan publik untuk pemangku kepentingan, melalui komputer. Senada dengan itu, Putra and Swastika, (2016) menjelaskan *e-government* ialah pemakaian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mempermudah proses komunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait. Sementara Kumar and Best (2006) mengatakan *e-government* adalah pemanfaatan TIK di sektor publik bertujuan meningkatkan operasi dan penyampaian layanannya. Lebih detail, Lupu & Georgiana (2015) mendefinisikan *e-government* yaitu penerapan TIK oleh lembaga pemerintah, yang dimaksudkan untuk menjalin interaksi dan transaksi dengan masyarakat, pelaku bisnis, dan organisasi pemerintah. Dengan kata lain, bahwa *e-government* adalah media yang digunakan pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang aktivitas-aktivitas pemerintahan yang telah, sedang, dan akan berlangsung kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Ardielli (2016) *e-government* mempunyai peran penting dalam upaya modernisasi lembaga pemerintah, untuk mengubah lembaga pemerintah dan layanan publik menuju transparansi, ketersediaan informasi, dan partisipasi warga yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Senada dengan itu Lupu & Georgiana (2015) menyatakan bahwa teknologi informasi menawarkan pendekatan baru untuk menciptakan transparansi dan mempromosikan anti-korupsi, yang mengarah pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam fungsi organisasi publik dan memungkinkan pemerintah untuk memperluas perannya sebagai penyedia layanan yang berfokus pada pelanggan, yang meru-

pakannya inti dari kegiatan pengembangan *e-government*. Sejalan dengan itu, Sayimer (2015) juga mengungkapkan bahwa *e-government* dapat menjalankan berbagai macam tujuan yang berlainan, diantaranya; memfasilitasi penyampaian layanan pemerintah yang lebih baik kepada masyarakat, menciptakan hubungan lebih erat antara bisnis dengan industri, partisipasi masyarakat (publik) meningkat melalui akses informasi yang memadai, dan bahkan menambah efisiensi manajemen pemerintah. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh bisa berupa berkurangnya korupsi, promosi transparansi, meningkatnya penerimaan, dan/atau berkurangnya pengeluaran. Simpulannya, *e-government* diharapkan menjadikan pemerintah lebih transparan, sehingga dapat mengurangi tindakan korup pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat (publik).

Konsep Transparansi

Meskipun, di dalam literatur didapatkan para ahli mengkonseptualisasikan transparansi berbeda-beda. Akan tetapi, pada intinya memiliki arti yang serupa dari konsep yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, Meijer (2013) mengungkapkan transparansi sebagai bentuk ketersediaan informasi perihal pelaku yang membolehkan pelaku lain untuk mengontrol cara kerja maupun kinerja pelaku pertama. Kemudian, Esteves de Araujo and Tejedor-Romero (2016) menyatakan transparansi merupakan konsep yang luas berkaitan dengan keberadaan informasi, aksesibilitas, dan informasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Agak berbeda dengan definisi sebelumnya, Hirsch and Osborne (2000) menyatakan transparansi ialah sebuah wahana untuk mendorong efektivitas keputusan administrasi dan manajerial. Lain halnya dengan Silver (2005) yang dikutip oleh Ridha and Basuki (2012) menjelaskan bahwa transparansi adalah bentuk tindakan kejujuran dan kecermatan, tidak semata terbatas pada volume informasi yang disajikan kepada publik, tetapi juga tentang bagaimana organisasi tersebut menjalankan operasionalnya. Senada dengan itu, Armstrong (2005) berpendapat bahwa transparansi didasarkan pada aksesibilitas informasi yang luas oleh masyarakat, tepat waktu, serta dapat diandalkan sebagai rujukan pengambilan kebijakan dan kinerja pada organisasi sektor publik. Singkatnya, transparansi menekankan pada tersedianya suatu informasi tentang lembaga pemerintah, kemudian membolehkan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menilai dan mengevaluasi capaian in-

ternal pemerintah dan prestasi organisasi publik (Grimmelikhuijsen, 2012; Meijer, 2013). Utamanya, informasi yang dipublikasikan tepat waktu serta dengan mudah dapat dinikmati oleh seluruh kalangan yang membutuhkan (Ritonga & Syamsul, 2016; Syamsul & Ritonga, 2017).

Dampak Implementasi *E-government* terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut López-lópez et al. (2018) secara umum diyakini bahwa meningkatnya transparansi pemerintah saat ini, dikarenakan hadirnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor tersebut (Meijer, 2013). Senada dengan itu, Ardielli (2016) transparansi administrasi publik (lembaga pemerintah) sangat didukung oleh masuknya TIK di sektor ini. Konsekuensinya, pemerintah harus menggunakan TIK sebagai mekanisme untuk membangun (memperluas) kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintah melalui peningkatan transparansi (Grimmelikhuijsen, 2012; López-lópez et al., 2018). Dengan demikian, menurut López-lópez et al. (2018) peneliti seperti Norris (2001) dan Tolbert and Mossberger (2006) memandang transparansi sebagai suatu mekanisme yang dapat mengembalikan kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah. Sementara itu, Cook, Jacobs, and Kim (2010) berpendapat bahwa, dengan meningkatkan jumlah informasi yang tersedia tentang bagaimana kinerja pemerintah, pengetahuan warga akan ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan pada akhirnya kepercayaan mereka pada pemerintah. Sederhananya, TIK memungkinkan penyampaian informasi yang lebih efisien, yang sangat penting karena efisiensi dan penyampaian informasi, sering digambarkan sebagai dua pendorong utama untuk meningkatkan kepercayaan pada pemerintah (Andersen et al., 2010).

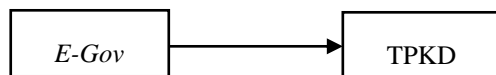
Selanjutnya, melalui TIK ini, pemerintah mengembangkan *e-government* sebagai media yang membolehkan akses publik yang lebih luas terhadap informasi pemerintah dan transparansi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan (Gupta, Dasgupta, & Gupta, 2008). Iyer & Rao RN (2017) juga mengemukakan bahwa *e-government* memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam proses-proses (penyelenggaraan pemerintahan) dengan bantuan TIK yang dapat mereduksi tindakan korupsi pemerintah, promosi tata pemerintahan yang baik, dan dukungan untuk reformasi (Bertot et al. 2010). Artinya, *e-government* memberikan peluang signifikan untuk mengubah lembaga pemerintah yang ter-

tutup menuju lembaga pemerintah yang mengedepankan transparansi, keterbukaan, dan ketersediaan informasi yang lebih besar (Ardielli, 2016). Hasil penelitian (lihat, John Carlo Bertot, Jaeger, and Grimes 2012; Jaeger and Bertot 2010; John C. Bertot, Jaeger, and Grimes 2010; Abu-Shanab 2013; López-lópez et al. 2018; Lupu and Lazăr 2015) berhasil membuktikan bahwa *e-government* mampu meningkatkan transparansi pemerintah. Dengan demikian, diajukan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

Ha: Implementasi *e-government* berdampak positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kerangka Pemikiran

Paradigma penelitian ini dijelaskan sebuah hipotesis alternatif pada poin sebelumnya. Kemudian, diwujudkan dalam bentuk Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

Merujuk pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa variabel independen pada penelitian ini adalah implementasi *e-government* (E-Gov) yang memiliki pengaruh pada variabel dependen yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah (TPKD).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang bertujuan menjelaskan secara empiris dampak implementasi *e-government* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data primer melalui analisis isi, yaitu

dengan melakukan observasi pada website resmi pemerintah daerah di Indonesia. Daftar website resmi tersebut, diunduh dari website Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (www.kemendagri.go.id). Selengkapnya, terkait daftar website pemerintah daerah dapat dilihat pada alamat link berikut ini, <https://www.kemendagri.go.id/files/Daftar%20Alamat%20Kantor%20Prov-Kab-Kota.pdf>

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 542 pemerintah daerah di Indonesia. Populasi penelitian ini didasarkan pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan Inpres No. 07 Tahun 2015. Inpres No. 3 Tahun 2003, yang mewajibkan setiap organisasi pemerintah, baik di-tataran

pemerintah pusat maupun daerah untuk merancang, mengembangkan serta mengimplementasikan konsep *e-government*, sebagai wadah penyaluran informasi kepada publik. Sementara Inpres No. 7 Tahun 2015 ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam rangka peningkatan keterbukaan pengelolaan anggaran daerah. Sementara itu, sampel penelitian ini terdiri dari 80 pemerintah daerah di Indonesia. Metode penetapan sampel pada penelitian ini, melalui pemilihan non-random dengan metode purposive sampling. Terdapat beberapa kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyaring sampel riset ini, diantaranya pemerintah daerah yang mempunyai *website* resmi dan dapat diakses pada waktu penelitian dari bulan Maret-Agustus 2020, dan memiliki data transparansi pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2019. Lebih lanjut, tabel 1 di bawah ini menggambarkan langkah-langkah pemilihan sampel merujuk syarat-syarat yang ditetapkan.

Tabel 1
Prosedur Seleksi Sampel

No	Deskripsi	Jumlah Sampel
1.	Total pemerintah daerah Per 31 Desember 2018	542
2.	Dieliminasi karena tidak mempunyai <i>website</i> resmi (tidak ditemukan)	(50)
3.	Dikeluarkan karena <i>website</i> tidak dapat diakses (<i>maintanance</i>)	(97)
4.	Dieliminasi karena tidak memiliki data yang dibutuhkan	(260)
5.	Data outlier	(55)
Sampel akhir		80

Sumber: Data diolah, 2020

Definisi Operasional dan Pengukuran

E-government diartikan sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah dalam rangka memperkuat hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, diantaranya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku bisnis, pemerintah dengan pemerintah lainnya. Variabel penerapan *e-government* diukur berdasarkan Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2003. Pengukuran keberhasilan penerapan *e-government* dilakukan dengan melakukan pengamatan pada masing-masing situs *website* resmi pemerintah daerah. Pengukuran atas indikator dari setiap dimensi dari variabel *e-government* dengan menggunakan skala likert. Jika suatu item (indikator) dinilai lengkap maka diberi angka 5, kurang lengkap angka 4, cukup lengkap angka 3, tidak lengkap angka 2, tidak ada angka 1. Setelah itu, menghitung rata-rata setiap dimensi dari variabel *e-government* dengan cara, membagi total nilai yang didapatkan dari setiap dimensi dengan jumlah item (indikator) dari dimensi tersebut, kemudian dikalikan dengan bobot dimensi yang telah ditentukan. Kemudian, menjumlahkan setiap dimensi variabel *e-government* kemudian dikalikan 20% untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan *e-government* pada setiap pemerintah daerah yang dinilai (Putra and Swastika 2016).

Sementara itu, transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah berkaitan dengan keterbukaan pemerintah daerah dalam menetapkan keputusan anggaran (keuangan), dengan demikian dengan mudah dapat diketahui dan dikontrol oleh masyarakat dan publik lainnya. Studi ini menghitung kadar transparansi pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada 12 indikator Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) (lihat, Instruksi Kemendagri No.188.52/1797/SJ/2012 dan lampiran Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2015 poin 32. Penetapan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan pengamatan pada situs *website* resmi pemerintah daerah (Ritonga & Syamsul, 2016). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala dikotomi, artinya apabila suatu indikator pengelolaan keuangan tersedia, dapat diakses, dan disajikan tepat waktu pada *website* resmi pemerintah daerah, masing-masing diberi angka 1 (satu) untuk

setiap kriteria. Sebaliknya, apabila suatu indikator yang diamati tidak publikasikan, kemudian tidak dapat diunduh, dan disajikan melewati rentang waktu yang ditetapkan, maka masing-masing

dikasih angka 0 (nol). Setelah itu, nilai yang didapatkan untuk kriteria ketersediaan dan aksesibilitas dikalikan 0,25. Skor yang diperoleh untuk kriteria ketepatan waktu publikasi dikalikan 0,5. Hasil perkalian tersebut, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor keseluruhan untuk setiap indikator. Nilai akhir yang didapatkan setiap indikator, selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor total yang diperoleh setiap pemerintah daerah. Terakhir, menetapkan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk setiap pemerintah daerah dengan cara membagi total skor yang didapatkan dengan total skor yang diharapkan dapat dicapai (dihasilkan) setiap pemerintah daerah pada setiap item, kemudian dikalikan seratus (Ritonga & Syamsul, 2016).

Teknik Analisis Data

Teknik pengujian data pada penelitian ini, dimulai dari uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier sederhana, koefisien determinasi, dan terakhir dilakukan uji T

Analisis Regresi Linier Sederhana

Model regresi linier sederhana dilakukan untuk menguji, apakah implementasi *e-government* berimplikasi pada peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Adapun model regresi penelitian ini sebagai berikut:

$$TPKD = a + \beta E-Gov + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

TPKD = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

E-Gov = Implementasi *e-government*

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Kesalahan Pengganggu

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Penelitian

Pada tabel 2 menunjukkan variabel *e-government* memiliki nilai terendah sebesar 0,45, nilai tertinggi 0,81, dan nilai rerata sebesar 0,66. Artinya, secara rerata pemerintah daerah menerapkan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan masih termasuk dalam kualifikasi kurang lengkap/baik (KABTA, 2015 dalam Putra and Swastika, 2016). Selanjutnya, variabel transparansi

pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai terendah 0,13, nilai tertinggi 1,00, dengan nilai rerata sebesar 0,37. Artinya, angka rerata ini mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berada dibawah angka 0,60, sehingga masih termasuk dalam kualifikasi

sangat tidak transparan (Adiloglu & Vuran, 2012). Hasil ini sesuai dengan penelitian (Ritonga and Syamsul, 2016; Syamsul and Ritonga, 2017; Syamsul, 2020) yang juga menjelaskan bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih kecil (rendah).

Tabel 2
Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
Egovernment	80	0,45	0,81	0,66	0,09
TPKD	80	0,13	1,00	0,37	0,23

Sumber: data primer diolah, 2020

Deskriptif Penelitian

Mengacu pada tabel 3, tertera besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 1,237 dengan tingkat signifikansi 0,094. Maknanya, residual model

regresi penelitian ini terdistribusi secara normal, karena nilai signifikansinya lebih besar dari yang ditetapkan yaitu 0,05 ($0,094 > 0,05$)

Tabel 3
Uji Normalitas Data

Variabel	N	KS-Z	Sig	P-Value	Ket.
<i>E-government</i>	80	1,237	0,094	$P > 0,05$	Data Normal

Sumber: data primer diolah, 2020

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji statistik dengan Spearman's Rank Correlation pada tabel 4 menunjukkan variabel *e-government* berpengaruh tidak signifikan terhadap

variabel unstandardized residual. Dengan tingkat signifikansinya 0,719 melewati ambang batas nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, oleh karena itu model regresi terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4

Uji Heteroskedastisitas Data

Variabel	N	Koefisien	Sig	P-Value	Ket.
<i>E-government</i>	80	-0,041	0,719	$P > 0,05$	Data Bebas

Sumber: data primer diolah, 2020

Uji Heteroskedastisitas

Studi ini mengkaji dampak implementasi *e-government* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Model regresi pada tabel 5 menearangkan angka R Square sebesar 0,152. Angka ter-

sebut mengindikasikan bahwa penerapan *e-government* mampu menjelaskan sebesar 15,2 persen transparansi pengelolaan keuangan daerah, sementara sebesar 84,8 persen ditentukan oleh variabel luar.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien	Nilai T	Sig	P-Value	Ket.
(Constant)	-0,268	-1,558	0,123	$P > 0,05$	Tidak Signifikan
<i>E-government</i>	0,960	3,738	0,000	$P < 0,05$	Signifikan
R-Square	0,152				

Sumber: data primer diolah, 2020

Uji t pada tabel 5 memperlihatkan nilai koefisien regresi *e-government* sebesar 0,960, dan nilai t hitung sebesar 2,413 pada tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi *e-government* tersebut lebih rendah dari taraf signifikansi yang diajukan sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Model ini mengindikasikan bahwa kenaikan 1 persen indeks *e-government*

mengakibatkan terjadinya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 96 persen. Fakta ini mencerminkan bahwa penerapan *e-government* memiliki pengaruh positif dan signifikan pada transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan riset ini adalah iya, implementasi *e-government* mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan

daerah di Indonesia, begitupula hipotesis yang diusulkan pada riset ini tidak dapat ditolak.

Pembahasan

Studi ini memperlihatkan bahwa implementasi *e-government* berdampak positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Artinya, semakin baik tingkatan penerapan *e-government* menjadikan level transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi. Bukti tersebut, konsisten dengan temuan Torres, Pina and Royo (2005) tentang pemerintah regional dan lokal di Uni Eropa, Bonsón et al. (2012) tentang pemerintah lokal UE, dan Alcaraz-quiles et al. (2018); López-lópez et al. (2018) di Spanyol, yang menjelaskan bahwa implementasi *e-government* penting untuk meningkatkan transparansi publik. Kemudian, temuan ini menguatkan argumentasi Bannister and Connolly (2014) menegaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan transparansi.

Selain itu, temuan ini juga mendukung pendapat dari Jaeger and Bertot (2010), mengungkapkan bahwa situs *website* entitas publik, portal data, media sosial, pertemuan online, dan umpan balik atas kebijakan publik memainkan peran penting dalam mempromosikan transparansi pemerintah, dan juga sejalan dengan Hill (2004) yang menjelaskan bahwa manfaat utama dari penggunaan *e-government* adalah peningkatan transparansi pemerintah, sehingga memudahkan masyarakat (publik) untuk memantau jalannya pemerintahan, dengan demikian lebih sulit bagi pemerintah untuk terlibat dalam praktik korupsi. Begitu pula, argument Lupu and Georgiana (2015) yang menyatakan bahwa *e-government* digunakan, karena diyakini sebagai cara yang efisien dan efektif untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi publik. Kemudian, sesuai dengan pendapat Ardielli (2016) yang menyatakan bahwa *e-government* dapat memberikan peluang yang signifikan untuk mengubah lembaga pemerintah yang tertutup menjadi lebih transparan, terbuka, dan informasi yang tersedia lebih banyak. Singkatnya, penerapan *e-government* itu penting untuk mendorong transparansi pemerintah, sebab dinilai jalan inilah yang paling efisien dan efektif untuk mencurahkan informasi yang seluas-luasnya kepada publik.

Secara khusus, dalam konteks Negara Republik Indonesia penelitian ini mendukung Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, yang mengha-

ruskan setiap organisasi pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk merancang, mengembangkan serta mengimplementasikan *e-government*, sebagai wadah penyaluran informasi kepada publik. Implementasi *e-government*, selain untuk mempromosikan transparansi, menurut Lupu and Georgiana (2015) *e-government* juga memiliki berbagai tujuan, yaitu: mempercepat penyampaian layanan kepada publik (masyarakat), hubungan antar bisnis dan industri, meningkatkan akses publik terhadap informasi, meningkatkan efisiensi pemerintah, dan pada akhirnya mengurangi korupsi, dan mereduksi biaya. Kemudian, menurut Sayimer (2015) agar penerapan *e-government* berhasil, pemerintah harus melibatkan warganya dan memasukkan pandangan, harapan, dan keinginan (minat) mereka ke dalam kebijakan, sebab pengetahuan ini akan membangun kepercayaan yang lebih besar antara warga dan pemerintah. Akhirnya, transparansi melalui *e-government* sangat penting dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

5. SIMPULAN

Riset ini berhasil menerangkan bahwa penerapan *e-government* berdampak positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Artinya, peningkatan kualitas implementasi *e-government* berimplikasi pada naiknya indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, hasil ini paralel dengan temuan (Alcaraz-quiles et al., 2018; Bonsón et al., 2012; López-lópez et al., 2018; Torres et al., 2005) yang membuktikan bahwa penerapan *e-government* menjadikan transparansi pemerintah yang lebih baik. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian ini, adalah iya, implementasi *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan berimplikasi positif pada peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Selanjutnya, temuan penelitian ini memiliki kontribusi praktis bagi pemerintah (pejabat kementerian terkait), untuk dapat dijadikan sumber rujukan dalam mengambil keputusan yang efektif. Dalam rangka mempromosikan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang lebih luas. Maka, solusinya adalah dengan mengoptimalkan penerapan *e-government*. Untuk itu, pejabat terkait perlu melakukan pemeringkatan penerapan *e-government* untuk

setiap periode, sehingga diketahui posisi implementasi *e-government* suatu daerah berada level mana, apakah termasuk tingkatan bawah atau tingkatan atas. Kemudian, studi ini juga dapat dijadikan sumber referensi pada penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang “*e-government* dan transparansi” di Indonesia. Penelitian ini terbatas hanya menguji *e-government* saja sebagai variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Riset selanjutnya dapat menguji variabel independen lain, seperti komitmen kepala daerah, persaingan politik, solvabilitas keuangan, karakteristik kepala daerah, dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Esteves de Araujo and Tejedo-Romero, 2016; Abu-Shanab, 2013; Jaeger and Bertot, 2010).

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Shanab, E. A. (2013). The relationship between transparency and e-government: An empirical support. *Lecture Notes in Informatics (LNI), Proceedings - Series of the Gesellschaft Fur Informatik (GI), P-221*, 84–91.
- Adiloglu & Vuran. (2012). The Relationship Between The Financial Ratios And Transparency Levels Of Financial Information Disclosures Within The Scope Of Corporate Governance: Evidence From Turkey. *The Journal of Applied Business Research*, Vol. 28, pp. 543–554.
- Alcaraz-quiles, F. J., Urquia-grande, E., Muñoz-colomina, C. I., & Rautiainen, A. (2018). *E-government Implementation: Transparency, Accessibility and Usability of Government Websites*. 291–306. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63284-1>
- Andersen, K. N., Henriksen, H. Z., Medaglia, R., Danziger, J. N., Sannarnes, M. K., & Enemærke, M. (2010). Fads and facts of *E-government*: A review of impacts of *E-government* (2003-2009). *International Journal of Public Administration*, 33(11), 564–579. <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.517724>
- Ardielli, E. (2016). *Public Administration Transparency in E - government at Local Level of Czech Government 2 . Research Methods and Data*. 2(8), 24–33. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.28.1003>
- Armstrong, E. (2005). Integrity, transparency and accountability in public administration: Recent trends, regional and international developments and emerging issues. *United Nations, Department of Economic and Social ...*, (August), 1–16. Retrieved from <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN020955.pdf>
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119–128. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.002>
- Bertot, John C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Bertot, John Carlo, Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2011). *Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government*. 78–91. <https://doi.org/10.1108/17506161211214831>
- Bertot, John Carlo, Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative *e-government*. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 78–91. <https://doi.org/10.1108/17506161211214831>
- Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local *e-government* 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(2), 123–132. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001>
- Cook, F. L., Jacobs, L. R., & Kim, D. (2010). Trusting what you know: Information, knowledge, and confidence in social security. *Journal of Politics*, 72(2), 397–412. <https://doi.org/10.1017/S0022381610000034>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmeliikhuijsen, S. G. (2017). 25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685.25>

- Esteves de Araujo, J. F. F., & Tejedó-Romero, F. (2016). *Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings*. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-02-2016-0064>
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: an experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50–73. <https://doi.org/10.1177/0020852311429667>
- Gupta, B., Dasgupta, S., & Gupta, A. (2008). Adoption of ICT in a government organization in a developing country: An empirical study. *Journal of Strategic Information Systems*, 17(2), 140–154. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.12.004>
- Hill, J. (2004). Does better e-government increase transparency? An empirical study of e-government and corruption. *The Public Purpose*, 2, 73–81. Retrieved from https://ij.soc.american.edu/spa/publicpurpose/upload/does-better-e-government-increase-transparency_-an-empirical-study-of-e-government-and-corruption-b926.pdf
- Hirsch, W., & Osborne, E. (2000). Privatization of Government Services: Pressure-Group Resistance and Service Transparency. *Journal of Labor Research*, XXI(2), 315–326.
- Iyer, L. S., & Rao RN, S. (2016). *Transforming Government: People, Process and Policy Article information* :
- Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Transparency and technological change: Ensuring equal and sustained public access to government information. *Government Information Quarterly*, 27(4), 371–376. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.003>
- Kumar, R., & Best, M. L. (2006). Impact and sustainability of E-government services in developing countries: Lessons learned from Tamil Nadu, India. *Information Society*, 22(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/01972240500388149>
- López-lópez, V., Iglesias-antelo, S., Vázquez-sanmartín, A., Connolly, R., & Bannister, F. (2018). e-government, Transparency & Reputation: An Empirical Study of Spanish Local Government e-government, Transparency & Reputation: An Empirical Study of Spanish Local. *Information Systems Management*, 35(4), 276–293. <https://doi.org/10.1080/10580530.2018.1503792>
- Lupu, D., & Georgiana, C. (2015). *Influence of e-government on the level of corruption in some EU and non-EU states*. 20(15), 365–371. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00085-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00085-4)
- Lupu, D., & Lazăr, C. G. (2015). Influence of e-government on the Level of Corruption in some EU and Non-EU States. *Procedia Economics and Finance*, 20(15), 365–371. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00085-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00085-4)
- Meijer, A. (2013). *Understanding the Complex Dynamics of Transparency*. 73, 429–439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>. Understanding
- Piotrowski, S. J. (2017). The “Open Government Reform” Movement: The Case of the Open Government Partnership and U.S. Transparency Policies*. *American Review of Public Administration*, 47(2), 155–171. <https://doi.org/10.1177/0275074016676575>
- Putra, I Gusti Lanang Agung Raditya; Swastika, I. P. A. (2016). *ANALISIS KERANGKA KERJA E-GOVERNMENT ASSESSMENT PADA SITUS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA*. 2016(Sentika), 18–19.
- Ridha, M. A., & Basuki, H. (2012). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *Skripsi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*, (SNA 15 Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat 20-23 Sept 2012), 1–28. Retrieved from <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/10/SNA-15-046.pdf>
- Ritonga, I. T. and Syamsul (2016) ‘Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia : berbasis website’, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2). doi: <https://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>.
- Sayimer, I. (2015). e-government, greater municipal web sites, citizen interaction, government transparency. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EBUSINESS AND EGOVERNMENT STUDIES*, 7(2), 1–16.

- Syamsul, S., & Ritonga, I. T. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadaptransparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 448. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.251>
- Syamsul (2020) 'POTRET TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (TPKD) DI INDONESIA', *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), pp. 185–204. doi: <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>
- Torres, L., Pina, V., & Royo, S. (2005). E-government and the transformation of public administrations in EU countries: Beyond NPM or just a second wave of reforms? *Online Information Review*, 29(5), 531–553. <https://doi.org/10.1108/14684520510628918>
- Wei Wu, Liang Ma, and W. Y. (2017). *Government Transparency and Perceived Social Equity: Assessing the Moderating Effect of Citizen Trust in China*. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10220/44112>